

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****NOMOR 17 TAHUN 2009****TENTANG****PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH BAGI PEMILIH DI LUAR NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT****KOMISI PEMILIHAN UMUM,****Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan Pasal I angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa pada Pasal 47 Undang-Undang 10 Tahun 2008 tersebut ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) yang berbunyi bahwa dalam hal masih terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap tetapi belum tercantum dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional dan/atau terdapat kelebihan jumlah pemilih dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional, KPU melakukan perbaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional sebanyak 1 (satu) kali;
- b. bahwa ketentuan pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa ketentuan tersebut pada huruf a dan huruf b, secara mutatis mutandis berlaku bagi pemilih yang sedang berada di luar negeri;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta memperhatikan perkembangan keadaan, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih di Luar Negeri untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih di Luar Negeri untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Badan Pelaksana dan Daftar Pemilih Tetap secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 164/Kpts/KPU/Tahun 2009;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Maret 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BAGI PEMILIH DI LUAR NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.**

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih di Luar Negeri untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ketentuan baru menjadi ketentuan Pasal 21a, berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21a

Dalam hal masih terdapat pemilih luar negeri yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap luar negeri tetapi belum tercantum dalam daftar pemilih tetap luar negeri dan/atau terdapat kelebihan pemilih dalam daftar pemilih tetap luar negeri, PPLN melakukan perbaikan daftar pemilih tetap luar negeri sebanyak 1 (satu) kali"

2. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (1) PPLN melakukan Rekapitulasi DPTLN.
- (2) PPLN menyampaikan Rekapitulasi DPTLN kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan RI.

- (3) Dalam hal masih terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap luar negeri tetapi belum tercantum dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri secara nasional dan/atau terdapat kelebihan jumlah pemilih dalam rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional, KPU melakukan perbaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional sebanyak 1 (satu) kali"

Pasal II

Untuk memudahkan dalam memahami dan menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini, ketentuan perubahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih di Luar Negeri untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, disusun dalam satu naskah.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2009

KETUA,

ttd.

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

Sajinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S.Santoso